



**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukamara**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PERANGKAT DAERAH)
TAHUN 2024**

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini didasarkan atas Surat Edaran Bupati Sukamara Nomor 050.5/110/SETDA Tanggal 25 Maret 2024 Tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini juga memuat hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara.

Akhirnya, dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan semoga RENJA ini dapat dijadikan acuan kerja khususnya bagi seluruh aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan umumnya bagi pihak-pihak terkait.

Sukamara, 01 April 2024

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukamara


H. Ir. IWAN MIRAZA
NIP. 19670514 199403 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	8
BAB IV PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.

Berdasarkan Surat Bupati Sukamara Nomor 050.5/110/SETDA Tanggal 25 Maret 2024 Hal Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) pada tahun 2024 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara tahun 2024.

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sukamara Tahun 2024 mengacu kepada pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sedangkan untuk prioritas program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Bupati Sukamara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67)
14. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sukamara Tahun 2024 adalah dalam rangka mengakomodir perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sukamara Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Menjadi dasar rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) DPMPTSP Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran;
3. Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan penyelenggaraan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan perizinan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Sukamara Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evauasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Berisi tabel uraian tentang evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan, evaluasi

penyelarasan perubahan Renja Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Kabupaten Sukamara.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tabel uraian mengenai rincian program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara tahun 2024, yang tersusun atas dasar dukungan dan partisipasi dari berbagai komponen masyarakat (stakeholder) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sukamara.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai terhadap target kinerja yang diharapkan, selanjutnya program dan kegiatan yang dievaluasi meliputi semua program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun anggaran 2024. Adapun evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kabupaten Sukamara
Triwulan I Tahun Anggaran 2024

Lampiran I

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome) (output)	Target RKPD Kabupaten pada tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (s-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (s-1) yang divalusi 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang divalusi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Pemerintah Daerah Penanggung Jawab	KET									
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)			
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									K	Rp.	
	3		URBAN PEMERINTAHAN WADAI YANG TIDAK SEHAT DAN BERKUALITAS																							Dinas PM dan PTSP		
	2	18	URBAN PEMERINTAHAN BIDANG PERAKAMAN MODAL		25.196.793		4.896.998.340		6.376.833.920		621.328.927					621.328.927		6.364.937.888								Dinas PM dan PTSP		
	2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URBAN PEMERINTAHAN DAERAH		21.398.768	4.643.608.961		5.033.133.920		621.328.927					621.328.927		6.364.937.888										
	2	18	01	2.02	Administrasi Kesengaja Pemerintah Daerah		21.398.768	4.643.608.961		5.033.133.920		621.328.927				621.328.927		6.364.937.888										
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		11.165.806	2.805.608.118		3.433.526.410.00		482.750.136			3	482.750.136		3.289.358.254		1,21	294,57								
			02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		697.340	34.920.000		27.520.000.00		3.700.000			1	3.700.000		38.620.000		1,08	55,38								
	2	18	01	2.06	Administrasi Kesengaja Pemerintah Daerah		21.398.768	4.643.608.961		5.033.133.920		621.328.927				621.328.927		6.364.937.888										
			02	Pengadaan Paket Dinas Beaserta Atribut Kelengkapannya		161.510	56.000.000		29.670.000		16.800.000			1	16.800.000		72.800.000		0,20	450,75								
			11	Rumahnya Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		550.000	144.032.315		130.000.000		0						144.032.315		0,60	261,88								
	2	18	01	2.08	Administrasi Urusan Pemerintah Daerah		2.136.063	442.679.100		438.381.340							442.679.100											
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		21.718	4.810.700		6.031.700								4.810.700		2,40	221,51								
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		282.122	42.516.950		48.289.640								42.516.950		2,40	150,70								
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		178.854	27.146.400		27.255.900								27.146.400		2,40	151,77								
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		133.660	29.575.000		23.150.000								29.575.000		2,40	221,27								
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		79.200	9.420.000		10.420.000								9.420.000		1,00	118,94								
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.435.000	329.210.050		321.000.000								329.210.050		0,02	229,41								
	2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintah Daerah		3.796.094	562.091.385		264.711.950		64.929.562			64.929.562		617.030.947											
			01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		507.700	327.780.000		51.600.000								327.780.000			645,62								
			09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2.628.700	127.665.000		127.665.000								127.665.000			47,31								
			11	Pengadaan Barak dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		388.694	106.646.385		203.113.950		54.929.562				54.929.562		161.575.947		0,24	274,47								
	2	18	01	2.08	Pemeliharaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintah Daerah		2.293.766	422.248.193		474.864.320		63.149.229			63.149.229		488.397.422											
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.025	358.000		375.000								358.000		2,40	349,27								
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		691.200	89.271.313		131.275.000		5.817.229			3	5.817.229		95.088.542		1,25	137,37								
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1.601.530	332.618.880		342.904.320		57.332.000			2	57.332.000		389.950.880		1,17	243,49								
	2	18	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintah Daerah		602.700	176.029.850		244.800.000							176.029.850											
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		448.500	103.029.850		142.800.000								103.029.850		1,71	229,72								

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (n-1) yang dievaluasi 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RAJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 9+10+11+12				14=7+13		15=14/6*100%		16	17				
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50.100	12 bulan	21.500.000	16 Unit	24.500.000							12	21.500.000	0,24	429,14				
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	105.100	0 -	50.500.000	1 Unit	77.500.000								50.500.000	0,00	480,49				
2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI PERAKAMAN MODAL	Pertemuan Capaian Data Potensi dan Peluang Investasi Daerah						90.000.000														
2	18	02	2.01	Penetapan Pembentukan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terdengarnya Penetapan Pembentukan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		150.000																		
			01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	150.000	0 -																	
2	18	02	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Terdengarnya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		1.055.600				90.000.000														
			02	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	1.565.600	0 -			90.000.000														
2	18	02		PROGRAM PROMOSI PERAKAMAN MODAL	Meningkatnya nilai modal promosi potensi investasi dan lapangan investasi		964.710		37.799.299		154.800.000														
2	18	02	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terdengarnya Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		964.710		37.799.299		154.800.000														
			01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	262.500	0 -																	
			02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5 dokumen	672.210	0 -	37.799.299		154.800.000				1		1	37.799.299	0,20	56,23					
2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PERAKAMAN MODAL	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Informasi Publik		1.228.891		69.822.900		90.925.000														
2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terdengarnya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1.228.891		69.822.900		90.925.000								69.822.900						
			01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	869.300	12 bulan	56.542.500	100 Pelaku Usaha	75.200.000,00							12	56.542.500	0,02	65,12				
			03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengabdian Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terselenggaranya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Pelaku Usaha	360.591	12 bulan	13.280.000	10 Pelaku Usaha	14.725.000,00							12	13.280.000	0,24	36,83				
2	18	06		PROGRAM PENGEDALIAN PELAKSANAAN PERAKAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi FMA/PMD (USD \$/Rupiah)		1.087.300		139.155.080																
2	18	06	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1.087.300		139.155.080										139.155.080						
			01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinat dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	35 Kegiatan Usaha	353.800	0 -		7 Kegiatan Usaha										0,00	0,00				
			02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	840 Pelaku Usaha	570.650	210 -	117.160.080	210 Pelaku Usaha							210	117.160.080	0,25	205,31					
			03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	65 Kegiatan Usaha	162.900	13 -	21.995.000	13 Kegiatan Usaha		0					13	21.995.000	0,20	135,02					
2	18	08		PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI PERAKAMAN MODAL	Pertemuan Capaian Data Potensi dan Peluang Investasi Daerah		964.710		37.799.299		154.800.000														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Regiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 9+10+11+12	14=7+13	15=(4/6)*100%	16	17							
	2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		516.075		6.612.500		7.075.000	-	-	-	-	-	-	6.612.500									
		01 Pengelolaan, Penerimaan dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dari Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Didata, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	dokumen	516.075	12 bulan	6.612.500	1 dokumen	7.075.000					-	6.612.500	0,00	12,81							

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.

Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam perubahan renja ini menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Secara rinci uraian program dan kegiatan berikut ini :

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/sub kegiatan (output)			Target Kinerja			Pagu (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Alasan Perubahan	
		RKPD 2024/RENJA PD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RKPD 2024/RENJA PD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RKPD 2024/RENJA PD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RKPD 2024/RENJA PD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2 18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								5.659.420.922	5.375.933.920	6.298.889.280			
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								5.659.420.922	5.375.933.920	6.298.889.280	DPMPTSP		
	2 18 01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentasi pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	Prosentasi pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	Prosentasi pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100 %	100 %	100 %	4.518.606.562	5.033.133.920	5.900.089.280	DPMPTSP	
	2 18 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentasi tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Prosentasi tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Prosentasi tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	3.533.504.386	3.461.046.410	3.772.466.410	DPMPTSP	
	2 18 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang	24 Orang	24 Orang	3.469.304.386	3.433.526.410	3.731.746.410	DPMPTSP	Menyesuaikan kebutuhan dinas, tambahan kekurangan gaji
	2 18 01 2.02 02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	64.200.000	27.520.000	40.720.000	DPMPTSP	Menyesuaikan kebutuhan dinas, tambahan
	2 18 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentasi Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentasi Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentasi Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	84.600.000	159.670.000	209.670.000	DPMPTSP	
	2 18 01 2.05 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	3 Paket	34.600.000	29.670.000	29.670.000	DPMPTSP	
	2 18 01 2.05 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	8 Orang	50.000.000	130.000.000	180.000.000	DPMPTSP	Menyesuaikan kebutuhan dinas
	2 18 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentasi Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentasi Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentasi Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	223.420.000	438.351.240	577.351.240	DPMPTSP	
	2 18 01 2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.000.000	6.231.700	6.231.700	DPMPTSP	
	2 18 01 2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	38.000.000	48.283.640	58.283.640	DPMPTSP	Menyesuaikan kebutuhan dinas
	2 18 01 2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000	27.265.900	31.265.900	DPMPTSP	Menyesuaikan kebutuhan dinas
	2 18 01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000	25.150.000	25.150.000	DPMPTSP	
	2 18 01 2.06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10.420.000	10.420.000	10.420.000	DPMPTSP	
	2 18 01 2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	130 Laporan	150 Laporan	130.000.000	321.000.000	446.000.000	DPMPTSP	Menyesuaikan kebutuhan dinas
	2 18 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentasi Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentasi Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentasi Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	70.000.000	254.711.950	486.671.950	DPMPTSP	
	2 18 01 2.07 01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	2 unit	2 unit	20.000.000	51.600.000	51.600.000	DPMPTSP	
	2 18 01 2.07 09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	unit	1 unit	-	-	115.000.000	DPMPTSP	Menyesuaikan kebutuhan dinas
	2 18 01 2.07 11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28 unit/buah	28 unit/buah	59 unit/buah	50.000.000	203.111.950	320.071.950	DPMPTSP	Menyesuaikan kebutuhan dinas

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/sub kegiatan (output)			Target Kinerja			Pagu (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Alasan Perubahan			
					RKPD 2024/RENJA PD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RKPD 2024/RENJA PD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RKPD 2024/RENJA PD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RKPD 2024/RENJA PD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	2	18	01	2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentasi Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentasi Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentasi Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	438.182.176	474.554.320	503.129.680	DPMTSP				
	2	18	01	2.06	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	375.000	375.000	375.000	DPMTSP	
	2	18	01	2.06	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	81.183.978	131.275.000	131.275.000	DPMTSP	
	2	18	01	2.06	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	356.623.198	342.904.320	371.479.680	DPMTSP	Menyesuaikan kebutuhan dinas, kekurangan honor non ASN
	2	18	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentasi Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentasi Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentasi Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	168.900.000	244.800.000	350.800.000	DPMTSP				
	2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Unit	14	unit	11	unit	100.900.000	142.800.000	142.800.000	DPMTSP	
	2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	Unit	45	unit	41	Unit	20.000.000	24.500.000	24.500.000	DPMTSP	
	2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	1	Unit	1	unit	1	Unit	48.000.000	77.500.000	183.500.000	DPMTSP	tambahan rehab gedung MPP
	2	18	02		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1	Investor	1	Investor	1	Investor	350.000.000	90.000.000	90.000.000	DPMTSP	
	2	18	02	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	ada/tidak ada	ada/tidak ada	ada/tidak ada	ada/tidak ada	ada/tidak ada	ada/tidak ada	ada/tidak ada	ada/tidak ada	ada/tidak ada	350.000.000	90.000.000	90.000.000	DPMTSP	
	2	18	02	2.02	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	350.000.000	90.000.000	90.000.000	DPMTSP	
	2	18	03		Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Presentase Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	60.800.000	154.800.000	154.800.000	DPMTSP				
	2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi yang terlaksana	Jumlah kegiatan promosi yang terlaksana	Jumlah kegiatan promosi yang terlaksana	2	Kegiatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	60.800.000	154.800.000	154.800.000	DPMTSP	
	2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	60.800.000	154.800.000	154.800.000	DPMTSP	
	2	18	04		Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.75	Nilai		93.75	Nilai		157.900.000	90.925.000	90.925.000	DPMTSP	
	2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	100 %			157.900.000	90.925.000	90.925.000	DPMTSP		
	2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	572	Pelaku Usaha	550	Pelaku Usaha	100	Pelaku Usaha	62.700.000	76.200.000	76.200.000	DPMTSP	
	2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan/Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	435	Orang	350	Orang	100	Orang	95.200.000	14.725.000	14.725.000	DPMTSP	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/sub kegiatan (output)			Target Kinerja			Pagu (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Alasan Perubahan			
							RKPD 2024/RENJA PD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RKPD 2024/RENJA PD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RKPD 2024/RENJA PD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024			RKPD 2024/RENJA PD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	60.000.000.000,-	Rupiah	59.120.760.000,-	533.414.360	-	50.000.000	DPMPTSP		
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaannya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase pelaksanaannya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	533.414.360	-	50.000.000	DPMPTSP		
	2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			10	Kegiatan Usaha		29.100.000	-		DPMPTSP		
	2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	307	Pelaku Usaha	60	Pelaku Usaha	313.744.360	-	30.000.000	DPMPTSP	tambahan kegiatan
	2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	25	Kegiatan Usaha	4	Kegiatan Usaha	190.570.000	-	20.000.000	DPMPTSP	tambahan kegiatan
	2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Presentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Presentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Presentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100 %	100 %	100 %	38.700.000	7.075.000	13.075.000	DPMPTSP		
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Jenis Penyajian Data dan Informasi Perizinan	Jenis Penyajian Data dan Informasi Perizinan	Jenis Penyajian Data dan Informasi Perizinan	2 sistem	2 sistem	2 sistem	38.700.000	7.075.000	13.075.000	DPMPTSP		
	2	18	06	2.01	01	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data danInformasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secaraElektronik	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data danInformasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secaraElektronik	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data danInformasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secaraElektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	38.700.000	7.075.000	13.075.000	DPMPTSP	tambahan cetak leaflet pelayanan perizinan	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2024 merupakan suatu dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang pada akhirnya diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara.

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini akhirnya memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra), dilaksanakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
2. Melaksanakan manajemen yang bersih, transparan dan bebas KKN.
3. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian

terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Akhirnya, dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan semoga Renja ini dapat dijadikan acuan kerja khususnya bagi seluruh aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan umumnya bagi pihak-pihak terkait.